

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Sulfi Findhu Ariesta<sup>1</sup>, Daimul Abror<sup>2</sup>, Teguh Pramono<sup>3</sup>, Ajie Hanif Muzaqi<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Kediri  
ajiehanif@unik-kediri.ac.id

### *Abstract*

*This study aims to describe and analyze the implementation process of Nganjuk Regency Regional Regulation Number 01 of 2015 along with supporting factors and obstacles to the implementation process of the Regional Regulation. The research method used by researchers is qualitative research with a descriptive type of research. Based on the results of interviews and observations, the results showed that the Implementation of Regional Regulation Number 01 of 2015 concerning Waste Management in Nganjuk Regency was based on the Donald Van Meter and Carl Van Horn Model, with 6 variables including: 1) policy target standards; 3) characteristics of the implementing organization; 4) the attitude of the executors; 5) communication between relevant organizations and implementation activities; and 6) the environment, economic and political, has been achieved quite well. There are several supporting factors for the implementation of Nganjuk Regency Regional Regulation Number 01 of 2015 concerning Waste Management, namely: 1) community participation/community participation; 2) availability of land to manage waste; and 3) visits from the Nganjuk Regency DLH to the community which are motivations for the community. While the inhibiting factors are as follows: 1) There is no Standard Operating Procedure (SOP); 2) inadequate facilities and facilities; 3) cultural factors.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Waste Management, Political Economy*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 beserta dengan faktor pendukung dan penghambat proses implementasi Peraturan Daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Nganjuk berdasarkan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan 6 variabel yang meliputi: 1) standar sasaran kebijakan; 2) sumber daya; 3) karakteristik organisasi pelaksana; 4) sikap para pelaksana; 5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan; dan 6) lingkungan, ekonomi dan politik, telah tercapai dengan cukup baik. Terdapat beberapa faktor pendukung atas terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu: 1) partisipasi masyarakat/peran serta masyarakat; 2) ketersediaan lahan untuk mengelola sampah; serta 3) kunjungan dari DLH Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat yang menjadi motivasi bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: 1) Belum ada Standart Operasional Prosedur (SOP); 2) faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai; 3) faktor kebudayaan.

**Kata kunci:** **Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Ekonomi Politik**

## PENDAHULUAN

Kecamatan Nganjuk merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Nganjuk yang mempunyai 13 (tiga belas) Kelurahan dan 2 (dua) Desa. Dengan luas wilayah 22,59 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 69,155 jiwa BPS dalam (Tyasotyningarum & Muzaqi, 2021). Produksi sampah di Kecamatan Nganjuk sangat banyak setiap hari, baik sampah masyarakat maupun sampah pertokoan. Sampah adalah sisa hasil kegiatan manusia sehari-hari baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Sampah seringkali diartikan seperti sisa-sisa material yang sudah tidak bermanfaat bagi manusia dari suatu proses kegiatan atau proses domestik, untuk sisa hasil dari kegiatan industri dinamakan limbah industri (Rahmadani, 2022).

Pembangunan pedestrian dan pembenahan kota salah satunya di Kecamatan Nganjuk yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya yang tentu tidak lepas dari tujuan agar kehidupan manusia itu yang selaras, serasi dan seimbang dengan alam. Cita-cita mulia ini adalah dambaan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang itu tidak mudah diwujudkan mengingat masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya lingkungan hidup tersebut, (Sanjaya, 2020).

Perkembangan dan pembangunan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dengan bertambahnya penduduk maka suatu daerah maka pembangunannya akan semakin meningkat. Setiap tahun sekitar 80 (delapan puluh) juta penduduk baru dan menambah jumlah penduduk yang ada di dunia, dan saat ini sudah miliar jiwa, dan sebagian besar pertambahan penduduk tersebut adalah sebesar 97 %. Penduduk dunia diperkirakan meningkat 8,1 (delapan koma satu) Triliun pada tahun 2025 dan 9,6 (sembilan koma enam) Triliun pada tahun 2050 mendatang (Madjid, 2020). Di satu sisi penduduk adalah pemicu pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk menjadi penghambat pembangunan karena penduduk yang memicu pembangunan adalah penduduk yang produktif sekaligus konsumtif, sebaliknya penduduk yang menghambat pembangunan adalah penduduk yang lebih konsumtif dibandingkan produktif, demikian juga bila kuantitas penduduk tidak terkendali, teori kependudukan (Bidarti, 2020).

Kecamatan Nganjuk atau masyarakat inilah sebagai penghasil (produsen) sampah. Sampah-sampah hasil produksi manusia biasanya bersifat organik (teruraikan) dan bersifat anorganik (tidak terurai). Sampah-sampah ini selalu berakhir pada tempat sampah. Sampah-sampah itu, diangkut oleh petugas kebersihan di setiap lingkungan kelurahan/desa untuk dipindahkan ke tempat TPS dan diangkut lagi ke TPA (Tempat Pebuangan Akhir). Setiap tahun

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan apresiasi kepada setiap pemerintah daerah yang mempunyai prestasi dalam menjaga lingkungan dan mengelolanya dengan baik, dengan memberikan Penghargaan Piala Adipura (Ahmad, 2022).

Saat ini yang kita butuhkan bukan hanya pemberitahuan tetapi suatu tindakan yang benar dan nyata untuk menaggulangi permasalahan tersebut. Menimbulkan tanggung jawab setiap individu untuk memberdayakan sampah dan membuatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya membuangnya saja. Banyak permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia misalnya kurangnya dasar hukum yang tegas, sarana dan prasarana yang belum memadai serta kurangnya suatu usaha atau kesadaran dari masyarakat tersebut misal pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan system yang tepat. (Mahyudin, 2017) mengatakan bahwa “permasalahan dalam pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa Indikator berikut : tingginya jumlah sampah, pegelolaan sampah yang minim, sarana yang terbatas, sumberdaya dan sumber dana yang masih kurang dan belum memadai”. Masalah masalah akan muncul seiring dengan nilai, moral dan realita yang ada di masyarakat itu sendiri

Menurut perkiraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) “jumlah sampah pada Tahun 2021 di 20 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk mencapai 423,90ton tiap hari. Sampah yang dihasilkan sebesar 3,2 % diangkut ke TPA, sebanyak 16,6% dibakar, dibuang ke sungai sebesar 5,2 % dan tidak tertangani sekitar 52,6 %”. Sekitar 52,6 % sampah yang tidak ditangani dibuang begitu saja. National Urban Development Strategy (NUDS) tahun 2003 Nurmandi (1999,143)menampaikan perkiraan bahwa rata-rata volume sampah yang dihasilkan perorang sekitar 0,5 -0,6kg/hari (Nurhajati, 2022).

Pada Tahun 2020, Kecamatan Nganjuk mendapat imbas dari luapan sungai kunci Kecamatan Ngetos, sehingga sering terjadi genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Berdasarkan identifikasi, genangan-genangan yang terjadi di Kecamatan Nganjuk disebabkan oleh karena banyak warga yang menutup saluran dan membuang sampah di sungai sehingga air di di sungai tidak mengalir dan tersumbat di drainase dan tidak mampu menampung kapasitas atau jumlah air yang meluber, drainase tersumbet ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat di sekitar yang membuang sampah disungai serta adanya endapan sediman, pasir dan gulma sehingga sungai tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Kecamatan Nganjuk menghasilkan sampah domestik rumah tangga sebanyak 4ton perharinya (data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, 2021).

Budaya masyarakat Kecamatan Nganjuk dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai, botol minuman yang di konsumsi setiap hari belum mengarah kepada pendekatan 3R yaitu *Reuse* (menggunakan kembali) *Reduce* (mengurangi) *Recycle* (daur ulang) sangat jauh dari tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun sudah ada Surat Edaran Bupati Nganjuk No 660/ 2026/411.315/2019 Tentang Pengurangan Sampah Plastik, serta Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 660 /2040/ 411.315 Tentang Program Penerapan *Eco Office* di Kanor – Kantor namun ebagian sampah yang ada berakhir disungai.

Sungai sering di salah artikan fungsinya oleh sebagian masyarakat, karena faktanya masih banyak tumpukan sampah yang terlihat dipermukaan sisi sungai. Sampah yang ada bisa jadi milik masyarakat Kecamatan Nganjuk itu sendiri namun tidak menutup kemungkinan sampah itu pemiliknya adalah masyarakatdi luar Kecamatan Nganjuk. Namun pada dasarnya siapapun pemilik sampah tersebut itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Akan mengakibatkan perusakan lingkungan dan menimbulkan pencemaran udara di Kecamatan Nganjuk itu sendiri. Jika terjadi penumpukan dan penyumbatan terhadap saluran air.

Salah satu wujud dari *good governance* adalah adanya partisipasi aktif anggota masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di tinjau dari segi organisasi, pemerintahan daerah organisasi yang bersistem terbuka (*Open System*). Organisasi pemerintahan seperti ini di tandai oleh adanya impor energy (*import of energy*) dari lingkungan agar dapat berfungsi dengan baik (Pasi et al., 2017). Harus saling melengkapi dalam melakukan kegiatan khususnya pengelolaan sampah pemerintah tidak mampu berdiri sendiri masyarakat pun membutuhkan dukungan pemerintah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah telah disusun dan di atur dengan baik cara pengelolaan persampahan yang diharapkan oleh Kabupaten Nganjuk. Namun setelah 6 tahun, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk ini ada, masyarakat Kecamatan Nganjuk di kejutkan dengan banjir yang melanda secara tiba tiba, dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih minim.

Sosialisasi dan inovasi Pemerintah hendaknya dilakukan secara rutin dan berkala agar masyarakat mengerti dan mampu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dan tentunya mampu berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Agar sampah yang ada dapat diminimalisir dan terkelola dengan baik. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan dan bergotong royong mewujudkan harapan dan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Juga Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif metode penelitian merupakan salah satu factor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Creswell, 2002). Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Nganjuk yang beralamat di Jalan Dermojoyo No 21, Kelurahan Payaman Kec. Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur kode Pos 64412. Peneliti memfokuskan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Study Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk), menggunakan pendekatan teori analisis implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dan data primer. Adapun data primer yang didapatkan pada penelitian ini didapat dari wawancara mendalam dengan aktor dan *stakeholder* yang akan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Sumber data Primer dan Sekunder Penelitian**

<b>Sumber data Primer</b>	<b>Sumber data Sekunder</b>
Camat Nganjuk	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
Kasi Pengelolaan Sampah DLH Kab. Nganjuk	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Domestik rumah tangga dan Sejenisnya
Lurah Pelayanan	United Nations Population Division. World Population Prospects. The 2015 Revision. New York: United Nations ;2015
Petugas Kebersihan Kelurahan	UU Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Perwakilan Masyarakat	

Dari tabel diatas peneliti menentukan 5 (lima) narasumber sedangkan data sekunder peneliti ambil dari peraturan-peraturan atau regulasi yang relevan dan masih berlaku tentang topik yang dikaji yaitu pengelolaan sampah. Sumber data atau Informan. Adapun yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Model analisis yang digunakan penulis untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Model (Van Meter & Van Horn, 1975), yang fokus pada ketercapaian 6 variabel sebagai berikut:

### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dimensi pertama dalam mengukur keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah mengetahui standar dan sasaran dari kebijakan yang dibuat. sebuah kebijakan harus mempunyai standar dan sasaran yang jelas agar dapat terlaksana dengan baik. Karena apabila tidak ada standar dan sasaran yang jelas akan mudah menimbulkan kesalahan-kesalahan diantara para pelaksana kebijakan. Juga Standar dan sasaran kebijakan dari sebuah kebijakan dapat diketahui dengan mengetahui tujuan kebijakan yang ditetapkan. Suatu kebijakan agar dapat terimplementasi dengan baik harus memiliki standar dan sasaran yang jelas. Dengan adanya standar dan sasaran yang jelas dapat memudahkan implementator dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Adapun menurut Van Horn dan Van Meter dalam menentukan standard dan sasaran jangan terlalu idealis, karena itu dapat menyebabkan kerumitan dalam hal implementasi kebijakan. Adapun dari penelitian diatas standar dari sebuah kebijakan itu berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dijalankan. Hal ini tidak membuat sebuah standar kebijakakn kehilangan kejelasan, karena perbedaan standar yang terdapat pada dinas ini dapat disatukan dengan adanya satu pedoman yaitu SOP yang berlaku dalam menjalankan implementasi tersebut.

### 2. Sumber Daya

Suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan sukses apabila sumber daya pelaksananya berkompeten dalam menjalankan kebijakan tersebut. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang turut menjadi penentu keberhasilan proses implementasi adalah sumber daya waktu dan finansial.

Dalam hal sumber daya ini ada tiga cakupan yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian diatas antara sumber daya

manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu dengan standard dan sasaran kebijakan itu memiliki keterkaitan. Karena bagaimanapun dalam mewujudkan suatu standar yang baik demi mewujudkan tujuan yang telah ditentukan itu dijalankan oleh seorang implementator. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mewujudkan implementasi kebijakan dengan baik dan benar. Dan karena itu pada hasil penelitian diatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Kurangnya sumber daya yang berkualitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Nganjuk dapat dipicu oleh kurangnya sumber daya finansial yang mendukung. Sumber Daya Waktu juga sangat diperlukan dimana seorang pegawai yang tidak menghargai waktu akan menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas dalam menangani pekerjaan dan hanya akan menghabiskan anggaran. Salah seorang informan menyampaikan “dalam rekrutmen tenaga kerja itu harus merupakan kebijakan pemerintah pusat dan tentunya setelah rekrutmen harus dibarengi dengan pelatihan pelatihan untuk mencetak SDM yang berkualitas, hal ini juga bersangkutan dengan sumber daya finansial tentunya. Karena terbatasnya sumber daya finansial menjadi kendala dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang persampahan, jadi keduanya pun berkaitan. Sedangkan untuk sumber daya waktu juga sangat berpengaruh dan pengaruh tersebut dengan sendirinya akan merubah sikap pandang kita dan membuat kita menghargai betapa pentingnya manajemen waktu. Sebab pengaruh tersebut akan hadir dalam hidup kita hari demi hari, jam demi jam, dan sepanjang waktu.” Dari pemaparan itu dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan adanya pelatihan, menghargai waktu dan untuk mewujudkan adanya pelatihan itu memerlukan anggaran yang dikeluarkan.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Organisasi formal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada gambaran umum yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya. Sedangkan organisasi informal yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut merupakan kelompok masyarakat yang telah berkontribusi dalam pengelolaan sampah di beberapa kelurahan di Kecamatan Nganjuk.

Dari penelitian diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Nganjuk bersikap tegas terbukti dengan adanya teguran yang disampasikakn oleh atasan kepada bawahannya apabila sang bawahan tidak melaksanakan tanggungjawab nya sesuai dengan tugas. Disiplin dalam hal waktu, yang mana keduanya ini sesuai dengan kriteria dari lembaga yang bersangkutan dengan masyarakat. Menurut (Grindle, 2017) lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakann berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan, makan karakteristik dari suatu lembaga akan mempengaruhi suatu kebijakan. Apabila dalam karakternya Dinas Lingkungan Hidup ini telah mencerminkan karakter yang baik, maka sangat besar kemungkinan implementasi kebijakan yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancer. Namun sebaliknya, apabila karakteristik dari suatu lembaga telah mencerminkan karakteristik yang buruk, maka sangat kecil kemungkinan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilakukan.

#### **4. Sikap Para Pelaksana/Disposisi Implementor**

Sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan Peraturan Daerah, terkait dengan penerimaan dan penolakan adanya kebijakan tersebut. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino, 2008) “sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top-down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Menurut (EDWARD III, 1980) Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik juga sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan seperti komitmen, kejujuran. Seorang implementator yang baik harus mempunyai disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakann. Dari penelitian diatas menyebutkan bahwa disposisi pelaksana yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan petugas pengelola kebersihan di salah satu Kelurahan di Kecamatan Nganjuk dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal secara umum saling mendukung karena memiliki tujuan yang



sama untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Nganjuk.

### **5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana**

Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif jika apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). Pemahaman para pelaksana bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus di komunikasikan kepada para pelaksana. Dalam berbagai program implementasi kebijakan, sebuah realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dengan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Jangan sampai terjadi miskomunikasi dalam hal apapun apalagi dalam penyampaian kebijakan yang akan diberlakukan.

Dalam sebuah implementasi, komunikasi adalah jantungnya. Dari hasil penelitian diatas komunikasi yang baik akan membangun koordinasi yang baik pula sehingga dalam implementasi suatu kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik. Penyampaian informasi yang terstruktur menjadi salah satu factor pendukung yang kuat dalam baiknya sebuah komunikasi. Dan dalam penyampaian informasi pun dapat di sampaikan dengan jelas dan konsisten. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi keberhasilan atau baik buruknya sebuah komunikasi, yaitu, transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dapat dilihat dari hubungan baik yang tercipta antara Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Nganjuk dan Kecamatan Nganjuk dengan lembaga yang bersangkutan itu telah membuktikan bahwa memang komunikasi yang terjalinpun sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai komunikasi yang baik.

### **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Peran serta pihak external yaitu pihak swasta dalam pengelolaan sampah dapat diwujudkan dengan terbentuknya Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap kawasan permukiman.

Dalam implementasi kebijakan sebuah lingkungan sangatlah penting karena menurut (Strokosch & Osborne, 2016) sebuah kebijakan harus sesuai dengan tuntutan lingkungan. Lingkungan lingkungan ini meliputi lingkungan sosial politik dan ekonomi. Dari penelitian

diatas dapat diketahui bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan sosial politik di Kecamatan Nganjuk ini mendukung terhadap implementasi kebijakan. Terbukti dengan antusiasme masyarakat yang besar terhadap implementasi kebijakan ini. Antusiasme masyarakat ini tidak terlepas dari dari usaha para implementator kebijakan dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat. Hal ini juga membuktikan bahwa kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi sangat berhubungan dengan komunikasi dan sumber daya manusia. Dari pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dilihat dari salah satu dimensi saja, melainkan harus juga dilihat dari dimensi yang lainnya. Dan dalam penelitian kali ini dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat antara satu dimensi dengan dimensi yang lapinnya. Sehingga apabila ada satu saja dimensi ytang tidak berjalan berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi pelaksanaan dimensi yang lainnya.

### **Faktor Pendukung Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Nganjuk**

Untuk faktor partisipasi atau peran serta masyarakat, memang meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah di Kabupaten Nganjuk khususnya wilayah Kecamatan Nganjuk, merupakan salah satu tujuan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Nganjuk, lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan bersih yang telah terbentuk di beberapa daerah di Kecamatan Nganjuk, membangun kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Ketersediaan lahan, meskipun Pemerintah Daerah telah menyiapkan lahan untuk pengelolaan sampah, sebagai faktor pendukung proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Di Kecamatan Nganjuk sendiri adanya ketersediaan lahan yang digunakan untuk membantu mempermudah pengelolaan sampah, tempat pengelolaan sampah Bank Sampah dan KSM serta TPS yang disediakan sebagainya yang dibutuhkan dalam mempermudah pengelolaan sampah di beberapa kelurahan di Kecamatan Nganjuk.

Faktor pendukung selanjutnya dalam proses implemetasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Nganjuk adalah adanya kunjungan dari pihak DLH Kabupaten Nganjuk, dimana pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan tiada hentinya melaksanakan Sosialisasi, Himbauan dan Surat Edaran tentang Pengelolaan sampah di Masyarakat.

## **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.**

Mengenai faktor penghambat implementasi peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Nganjuk, maka terdapat empat tiga yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan tersebut, yaitu: 1) Standar Operasional Prosedur ; 2) faktor sarana atau fasilitas yang memadai; 3) faktor kebudayaa.

Untuk faktor kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, dimana meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang digunakan untuk membantu mempermudah pengelolaan sampah. Fasilitas pengelolaan sampah ada berbagai bentuk seperti kontainer sampah, roda tiga, excavator, arm roll, dump truck, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam mempermudah pengelolaan sampah, ini dirasa masih kurang terbukti dengan adanya daerah permukiman yang belum mempunyai fasilitas yang memadai.



**Gambar 1. Fasilitas Truk Sampah yang ada di Kabupaten Nganjuk**

Sumber: Dokumentasi Peneliti



**Gambar 2. Fasilitas Roda 3 yang ada di Kabupaten Nganjuk**

Sumber: Dokumentasi Peneliti



**Gambar 3. Fasilitas 3R yang ada di Kabupaten Nganjuk**

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Faktor kebudayaan juga masih belum efektif, masih ditemui beberapa kekurangan dalam faktor kebudayaan tersebut Masyarakat cenderung membuang sampah dengan mencampur antara sampah basah dan sampah kering selain itu juga cenderung membuang sampah dengan keinginannya dan tidak sesuai pada tempat jenis sampahnya. Hal ini menjadi salah satu penghambat berjalannya Perda Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam menerapkan suatu kebijakan penting bekerja sama dengan warga, ini bertujuan untuk memudahkan penerapan suatu kebijakan dan mudah bersosialisasi kepada warga yang belum tahu tentang bahaya dan dampak membuang sampah secara sembarangan di sungai. Jadi masyarakat akan lebih memahami pentingnya melaksanakan Peraturan Daerah ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Nganjuk telah berjalan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang berdasarkan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan 6 variabel yang meliputi 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Nganjuk telah mencapai standar dan sasaran/tujuan kebijakan.; 2) sumber daya yang sudah kompeten baik itu sumber daya finansial maupun sumberdaya pendukung lainnya; 3) Adanya hubungan organisasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup, Pihak Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup juga bersikap tegas terhadap bawahan/ pegawai /petugas yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dilapangan.; 4) Masyarakat Kecamatan Nganjuk, menerima adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak DLH Nganjuk, dengan adanya pembinaan tersebut masyarakat di beberapa kelurahan berinisiatif membentuk bank sampah yang di masing-masing kelurahan.; 5) kepedulian masyarakat yang masih rendah tentang masalah sampah membuat komunikasi yang ingin dilakukan menjadi terhambat. dan 6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah terjalin cukup baik. Terdapat beberapa faktor pendukung atas terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu: 1) partisipasi masyarakat/peran serta masyarakat; 2) ketersediaan lahan untuk mengelola sampah; serta 3) kunjungan dari DLH Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat yang menjadi motivasi bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: 1) Belum ada Standart Operasional Prosedur (SOP); 2) faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai; 3) faktor kebudayaan. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan saran untuk masyarakat Kecamatan Nganjuk, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Pemerintahan Kecamatan Nganjuk untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ahmad, I. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bank Sampah di Propinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 44–426.
- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan*. Penerbit Lindan Bestari.
- Creswell, J. W. (2002). *Desain Penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: KIK.

- Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World* (Vol. 4880). Princeton University Press.
- Madjid, T. dkk. (2020). *E-Book Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2020*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mahyudin, R. P. (2017). *Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*. Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan), 3(1).
- Nurhajati, N. (2022). *Implementasi Program Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Mengurangi Penumpukan Sampah Di Kabupaten Tulungagung*. Publikauma, 10(1), 9–18.
- Pasi, N., Kadir, A., & Isnaini, I. (2017). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi*. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 7(1), 49–63.
- Rahmadani, T. (2022). *Evaluasi Pengelolaan Sampa di Pasar Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2022*. Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Sanjaya, P. K. A. (2020). *HUTAN LESTARI Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*. Unhi Press.
- Strokosch, K., & Osborne, S. P. (2016). *Asylum Seekers and the Co-production of Public Services: Understanding the Implications for Social Inclusion and Citizenship*. Journal of Social Policy, Vol. 45(4), 673–690.
- Tyasotyanningarum, B., & Muzaqi, A. H. (2021). *Praktik Pelayanan Publik di Daerah: Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Kinerja Organisasi Peringkat Daerah di Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 5(1), 115–131.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A conceptual Framework*. Administration & Society, 6(4), 445–488.